

TESIS

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN PASANGKAYU**

**COMMUNITY PARTICIPATION ANALYSIS IN
PREPARATION OF REGIONAL DEVELOPMENT WORK PLANS IN
PASANGKAYU REGENCY**

SYAHRIL



**PROGRAM STUDI
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN PASANGKAYU**

**COMMUNITY PARTICIPATION ANALYSIS IN
PREPARATION OF REGIONAL DEVELOPMENT WORK PLANS IN
PASANGKAYU REGENCY**

SYAHRIL



**PROGRAM STUDI
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN PASANGKAYU**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister
Program Studi
Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah

Disusun dan diajukan oleh

**SYAHRIL
P022211004**

Kepada

**PROGRAM STUDI
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN PASANGKAYU****SYAHRIL
P022211004**

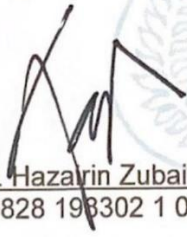
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 20 Februari 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



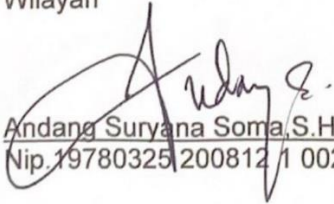
Prof. Dr. Ir. Hazarin Zubair, MS
Nip.19540828 198302 1 001



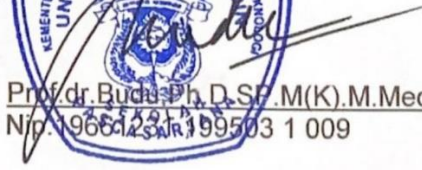
Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si
Nip.19790106 200501 1 001

Ketua Program Studi.
Perencanaan dan Pengembangan
Wilayah

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin



Andang Suryana Soma, S.Hut., MP.Ph.D
Nip.19780325 200812 1 002



Prof. dr. Budi Ph. D. S.P. M(K). M. Med. Ed.
Nip.19661231 199503 1 009



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Di Kabupaten Pasangkayu adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing (Prof. Dr. Ir. Hazairin Zubair, MS sebagai Pembimbing Utama dan Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si sebagai Pembimbing Pendamping). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah dipublikasikan di Journal of Public Administration and Governance sebagai artikel dengan judul "Community Participation Analysis in Preparation of Regional Development Work Plans in Pasangkayu Regency"

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, Februari 2023

Penulis,



SYAHRIL
Nim: P022211004

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah atas berkat Rahmat Allah SWT, penyusunan tesis ini dapat diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi S2 pada program studi Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah di Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar . Tesis ini dapat dirampungkan berkat bimbingan dan saran dari berbagai pihak, dengan begitu penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hazairin Zubair,MS Sebagai pembimbing utama dan Bapak Dr. A. Lukman Irwan,S.IP., M.Si sebagai pembimbing pendamping .
2. Bapak Prof. Dr. Hamka Naping,MA, Prof. Dr. Rabina Yunus , M.Si dan Bapak Dr. Jimmi R.A Torar, SE, M.SM sebagai Penguji Tesis .
3. Bapak Rektor Unhas, Dekan Sekolah Pasca Sarjana,Ketua Program Study dan Bapak/Ibu Dosen serta segenap staf program Magister Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pengetahuan dan bantuan selama menjalankan studi.
4. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu khususnya Bapak Bupati,Ibu Wakil Bupati,Sekretaris Daerah, Bapak Kepala Bappeda Litbang yang senantiasa memberi dukungan bagi para ASN untuk melanjutkan pendidikan.
5. Kedua Orang Tua, Istri dan Anak – Anak yang senantiasa selalu mengerti kondisi yang dihadapi dan senantiasa selalu memberi dukungan.
6. Dan seluruh pihak-pihak yang telah membantu yang tidak dapat di sebutkan satu-persatu. Semoga semua bantuan dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT, Amin.

Bila terdapat kekurangan dalam penyusunan tesis ini dari segi materi maupun penulisan, dengan segala keterbatasan penulis mohon maaf. Akhir kata semoga tesis ini dapat menjadi referensi baru di tengah luasnya bentangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran.

Makassar, Februari 2023

Penulis,



SYAHRIL

ABSTRAK

SYAHRIL. *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Di Kabupaten Pasangkayu* (di bimbing oleh, Hazairin Zubair dan A. Lukman Irwan).

Masyarakat pada hakekatnya adalah pihak yang paling mengetahui persoalan dan kebutuhannya sendiri, untuk itu partisipasi masyarakat memainkan peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun kenyataannya, masih ada ditemukan pemerintah daerah belum optimal melibatkan partisipasi masyarakat. Para ahli perencanaan partisipatif percaya “bahwa hasil terbaik akan dicapai ketika masyarakat lebih sadar dan terlibat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan”. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) melalui salah satu tahapan Musrenbang RKPD merupakan salah satu wujud implementasi perencanaan partisipatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan implementasi tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana Kerja pemerintah daerah dan mengidentifikasi faktor - faktor penentu tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Pasangkayu. Metode penelitian yang digunakan mixed methods sebuah metode kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif dengan teknik analisis data pembobotan yang dinilai dalam skala likert dan analisis data model interaktif .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah melalui musrenbang RKPD di Kabupaten Pasangkayu dari enam dimensi sebagai indikator perencanaan partisipatif ,ditemukan bahwa dimensi secara keseluruhan bila dirata ratakan dalam skala likert di nilai dalam kategori sedang, ini berarti tingkat partisipasi masyarakat masih dianggap cukup baik dengan uraian empat dimensi yakni dimensi fokus pada kepentingan masyarakat, sinergitas, legalitas dan fisabilitas dikategorikan pada tingkat partisipasi masyarakat cukup baik dan sedang. Sementara dua dimensi lainnya yakni dimensi partisipatoris dan dimensi dinamis masih kurang baik dan tergolong rendah. Sedangkan faktor penentu tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa dari keempat faktor yakni pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, dan latar belakang sosial budaya, faktor yang paling menentukan dan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat adalah faktor pekerjaan .

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, RKPD, Perencanaan Partisipatif

ABSTRACT

SYAHRIL. Analysis of Public Participation in the Preparation of Local Government Work Plans in Pasangkayu District (supervised by, Hazairin Zubair and A. Lukman Irwan).

Public participation has an important role in development planning, because basically public is the party that knows best about its own problems and needs. But in reality there are still many developments carried out by local governments that do not involve public participation. Based on the views of participatory development planning experts, the higher the community's awareness or participation in the planning process, the more optimal the output will be. The higher the level of public participation in development, the higher the level of success to be achieved. One form of participatory planning carried out by local governments in accordance with applicable regulations is the preparation of local government work plans (RKPD) with public involvement through one of the stages of preparing the RKPD, namely the "RKPD Musrenbang".

This study aims to determine, analyze and describe the implementation of the level of public participation in the preparation of local government work plans and identify the determinants of the level of public participation in Pasangkayu District. The research method used is mixed methods, a combination method between quantitative and qualitative with weighted data analysis techniques assessed on a Likert scale and interactive model data analysis.

The results showed that the implementation of the level of public participation in the preparation of local government work plans through the RKPD musrenbang in Pasangkayu District from six dimensions as an indicator of participatory planning, it was found that the overall dimensions when averaged on a Likert scale were rated in the medium category, this means that the level of public participation is still considered quite good with a description of four dimensions, namely the dimensions of focus on public interests, synergy, legality and feasibility which are categorized at the level of public participation is quite good and moderate. While the other two dimensions, namely the participatory dimension and the dynamic dimension, are still not good and are relatively low. While the determinants of the level of public participation show that of the four factors are education, occupation, gender, and socio-cultural background, the factor that most determines and influences the level of public participation is the occupation factor.

Keywords: Public Participation, RKPD, Participatory Planning

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pengajuan Tesis	iii
Halaman Persetujuan Tesis	iv
Lembar Pernyataan Keaslian	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Abstrak	vii
Abstract	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Pengertian Pembangunan	11
2.1.2 Pengertian Perencanaan	12
2.1.3 Perencanaan Pembangunan Partisipatif	13
2.1.4 Partisipasi Masyarakat	15
2.1.5 Faktor Penentu Tingkat Partisipasi Masyarakat	22
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Analisis	26
BAB III: METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	27
3.3 Variabel Penelitian	27
3.4 Sumber Data dan Metode Pengumpulan	28
3.5 Metode Pengambilan Sampel	30
3.6 Metode Analisis	31

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	36
4.1.1 Deskripsi Data	36
4.1.2 Tata cara penyusunan RKPD	40
4.1.3 Karakteristik Responden	56
4.1.4 Hasil Perhitungan	57
4.1.4.1 Fokus Pada Kepentingan Masyarakat	57
4.1.4.2 Partisipatoris	59
4.1.4.3 Dinamis	61
4.1.4.4 Sinergitas	62
4.1.4.5 Legalitas	63
4.1.4.6 Fisibilitas	65
4.2 Pembahasan	67
4.2.1 Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat	67
4.2.2 Faktor Penentu Tingkat Partisipasi Masyarakat	74
4.3 Implikasi Hasil Penelitian	80

BAB V: PENUTUP

5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	83
5.3 Keterbatasan Penelitian	83
5.6 Rekomendasi Untuk Penilaian Lebih Lanjut	84
Daftar Pustaka	85

DAFTAR TABEL

Nomor:		Halaman
2.1	Pendekatan-pendekatan partisipasi	19
3.1	Informan Penelitian	31
3.2	Informan Sampel Wawancara	31
3.3	Operasionalisasi Variabel	33
4.1	Luas daerah dan pembagian daerah administrasi	37
4.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Pasangkayu	37
4.3	Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pasangkayu	38
4.4	Karakteristik Responden Penelitian	56
4.5	Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Fokus Pada Kepentingan Masyarakat	58
4.6	Nilai Rata-rata Tanggapan Responden Terhadap Fokus Perencanaan Partisipatif Terhadap Kepentingan Masyarakat	59
4.7	Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Partisipatoris	60
4.8	Nilai Rata-rata Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Partisipatoris Dalam Perencanaan Partisipatif	60
4.9	Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Dinamis	61
4.10	Nilai Rata-rata Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Dinamis	61
4.11	Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Sinergitas dalam Perencanaan Partisipatif	62
4.12	Nilai Rata-rata Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Sinergitas dalam Perencanaan Partisipatif	63
4.13	Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Legalitas dalam Perencanaan Partisipatif	64
4.14	Nilai Rata-rata Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Legalitas dalam Perencanaan Partisipatif	64
4.15	Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Fisibilitas dalam Perencanaan Partisipatif	65
4.16	Nilai Rata-rata Tanggapan Responden Terhadap Dimensi Fisibilitas dalam Perencanaan Partisipatif	65
4.17	Nilai Rata-rata Tanggapan Responden Terhadap Semua Dimensi	66

DAFTAR GAMBAR

Nomor :		Halaman
1.1	Tahapan dan tatacara Penyusunan RKPD	6
2.1	Struktur partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan	15
2.2	Peluang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Alternatif Kebijakan dan Program“	16
2.3	Langkah-langkah Perencanaan Partisipatif yang Disusun dari Bawah	17
2.4	Kerangka Pikir Analisis partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RKPD	26
3.1	Analisis Data Model Interaktif	34
4.1	Peta Administrasi Kabupaten Pasangkayu	36
4.2	Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pasangkayu	39

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Kuesioner
2. Pedoman Wawancara
3. Dokumentasi Penelitian
4. Jawaban Responden Kuesioner

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, partisipasi masyarakat seringkali mudah diucapkan namun sulit diwujudkan. Partisipasi masyarakat sangat penting karena itu merupakan tuntutan undang – undang dan peraturan yang harus dijalankan. Selain itu gagasan keberlanjutan pembangunan tanpa didukung oleh partisipasi masyarakat, akan sulit diwujudkan dalam dokumen perencanaan pembangunan dan hasil pelaksanaannya. Konsep partisipasi yang semestinya juga sering disalahpahami dalam praktik birokrasi pemerintahan.

Penetapan kebijakan pembangunan berasal dari atas (pejabat yang berwenang) tanpa melibatkan masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya, masih ditemukan banyak masyarakat yang tidak memiliki dan tidak dapat memperoleh manfaat dari kegiatan pembangunan yang telah berlangsung karena tidak sesuai dengan kebutuhannya. Selama ini proses kebijakan pembangunan lebih sering dilakukan secara top-down proses bottom Up kelihatannya hanya sekedar formalitas . Untuk mewujudkan kesuksesan pembangunan masyarakat, maka sebaiknya program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan dari awal sudah melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui problem , kebutuhan dan pemanfaatan pembangunan di daerah mereka.

Tjokroamidjojo (1995: 8) menjelaskan bahwa pembangunan suatu bangsa adalah: 1) proses pertumbuhan di bidang sosial, ekonomi, politik, dan bidang kehidupan lainnya; (2) Proses perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan lebih merata dalam segala aspek kehidupan; (3) Proses pembangunan yang diprakarsai oleh, untuk, dan bersama masyarakat, atau partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, seiring dengan dimensi waktu, pembangunan merupakan proses yang terjadi secara bertahap dan terus menerus untuk menghasilkan hal-hal yang lebih baik. Selain itu pendapat lain yang dikemukakan oleh Conyers (1981:154-155), menurutnya yang juga mengidentifikasi tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat penting, yakni :

1. Cara memperoleh informasi tentang kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat .
2. Masyarakat akan memiliki rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap program kegiatan pembangunan dan akan lebih percaya jika mereka terlibat dalam penyusunan dan perencanaannya. Hal ini karena masyarakat akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan.
3. Mendorong partisipasi masyarakat karena dianggap bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan merupakan hak demokrasi.

Pemerintah telah mengembangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang terpadu, menyeluruh, sistematis, dan tanggap terhadap perubahan zaman untuk membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman masyarakat dan karakteristik geografis yang khas. Hal ini tertuang dalam "*Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)*". Dalam Pasal 1 SPPN disebutkan bahwa penyusunan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana tahunan yang disebut juga dengan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) diselenggarakan oleh penyelenggara negara atau pemerintah dengan melibatkan masyarakat . Salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah adalah melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) sebagaimana diatur dalam ketentuan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 melalui salah satu tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) .

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD menggunakan empat pendekatan yaitu "teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas". Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD menggunakan metode dan kerangka ilmiah. Partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan digunakan dalam pendekatan perencanaan partisipatif. Strategi politik dilakukan dengan memasukkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan membahasnya dengan DPRD. Sedangkan pendekatan top-down dan bottom-up merupakan hasil perencanaan yang

dikoordinasikan dalam musyawarah pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional .

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah selaras dalam konsep perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif merupakan pendekatan perencanaan yang berupaya untuk mengambil usulan - usulan masyarakat atau memulai proses tahapan perencanaan dari bawah ke atas, atau suatu model yang melibatkan banyak pihak atau sering disebut pula dengan perencanaan berbasis masyarakat. Perencanaan partisipatif dapat didefinisikan sebagai pihak yang dimiliki masyarakat untuk dapat terlibat secara demokratis dalam menentukan berbagai hal yang menyangkut kehidupannya.

Perencanaan partisipatif hendaknya disusun berdasarkan permasalahan dan kebutuhan yang dekat dengan masyarakat. Perencanaan yang berdasarkan pada masalah dan kebutuhan nyata masyarakat, akan mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat. Menurut Friedman (dalam Sinaga, 2005), perencanaan dengan pendekatan partisipatif, atau biasa disebut dengan perencanaan partisipatif, sebenarnya merupakan proses politik untuk memperoleh kesepakatan bersama melalui negosiasi antara seluruh pelaku pembangunan dalam rangka penetapan program pembangunan. Karena masyarakat merupakan pemangku kepentingan terbesar dalam penyusunan suatu rencana produk, maka perencanaan partisipatif memandang masyarakat sebagai mitra dalam perencanaan yang secara aktif berpartisipasi baik dalam penyusunan maupun pelaksanaan rencana tersebut.

Implementasi partisipasi masyarakat dalam konsep perencanaan partisipatif terlihat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) khususnya dalam tahapan Musrenbang RKPD. Tata cara penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sesuai "*Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah*" . Pada awal

persiapan penyusunan meliputi persiapan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD, orientasi terkait RKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun dan penyiapan data serta informasi perencanaan pembangunan. Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan rancangan awal RKPD

Penyusunan ranwal RKPD mengacu pada RPJMD, RKP dan pedoman penyusunan dalam Permendagri. Penyusunan ranwal mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi, analisis kapasitas riil keuangan daerah, telaah ranwal renja perangkat daerah, perumusan permasalahan pembangunan, telaah terhadap sasaran RPJMD, telaah terhadap arah kebijakan RPJMD, telaah terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional, telaah pokok-pokok pikiran DPRD, perumusan prioritas pembangunan daerah dan perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Dalam penyusunan ranwal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses atau penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam perda tentang RPJMD. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan secara tertulis kepada kepala Bappeda. Ranwal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Masukan dan saran dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala Bappeda dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat.

2. Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan ranwal RKPD berdasarkan ranwal renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan ditelaah. Rancangan RKPD diselesaikan paling lambat bulan April diminggu kesatu. Bappeda mengajukan rancangan RKPD kepada pimpinan daerah melalui sekda dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap rancangan RKPD dan pelaksanaan musrenbang.

3. Musrenbang RKPD

Penyusunan RKPD selanjutnya adalah Musrenbang RKPD. Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan RKPD. Rancangan RKPD dibahas dalam rangka menyepakati isu pembangunan daerah, prioritas, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator kinerja, sasaran, dan lokasi, serta menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan masing-masing daerah. Para pemangku kepentingan menghadiri musrenbang RKPD yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda. Berita Acara Kesepakatan menjadi dasar bagi hasil musrenbang RKPD dan ditandatangani oleh peserta yang mewakili para pemangku kepentingan.

Musrenbang RKPD dilaksanakan secara bertahap di setiap tingkatan, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, regional dan nasional. Musyawarah RKPD tingkat desa diselenggarakan Musrenbang RKPD tingkat desa untuk menjangkau saran masyarakat terhadap arah pembangunan. Hasil perencanaan ini akan diturunkan ke Musrenbang RKPD tingkat kecamatan. Para pemangku kepentingan bertemu dalam Musrenbang di tingkat kecamatan untuk memutuskan bagaimana menangani kegiatan program prioritas yang masuk dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan dan dikaitkan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota. Selain itu, Musrenbang di tingkat kabupaten menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan di daerah untuk membahas prioritas pembangunan di daerah dan menampung aspirasi mereka. Diskusi ini kemudian akan memberikan informasi dan masukan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

4. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Proses penyempurnaan draf RKPD menjadi draf akhir RKPD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan hasil Musrenbang RKPD. Dalam waktu satu minggu setelah pelaksanaan musrenbang RKPD, draf akhir RKPD dikirimkan ke sekretaris daerah untuk dibahas oleh seluruh pimpinan Perangkat Daerah. Pembahasan tersebut bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah masuk dalam draf final RKPD. Paling lambat akhir Mei, draf final sudah selesai. Bahan penyusunan Rancangan Perda tentang RKPD merupakan rancangan akhir RKPD yang

telah dibahas.

5. Penetapan RKPD

Dalam tahapan ini, rancangan perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh kepala Bappeda kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk persetujuan penetapan dan pengundangan, paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan perkada tentang RKPD. Bupati menetapkan Perkada tentang RKPD Kabupaten paling lambat 1 minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan. Perkada tentang RKPD Kabupaten, dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir renja Perangkat Daerah Kabupaten, pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD Kabupaten serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Kabupaten.

Ringkasan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.1

Tahapan dan tatacara Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan memiliki dua posisi utama yakni sebagai pelaku utama dan Pemanfaat, salah satu implementasi proses perencanaan partisipatif yakni proses perencanaan yang mempertemukan mekanisme perencanaan dari pusat (top down) dan perencanaan dari bawah (bottom up) yang diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Dalam praktiknya, proses musrenbang ini masih menghadapi berbagai persoalan. Salah satunya di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, yang menyisakan berbagai problem partisipasi masyarakat dan perencanaan pembangunan khususnya dalam konsep perencanaan partisipatif. Berdasarkan hasil observasi dan prasarvei pada tiga tahun terakhir di Kabupaten Pasangkayu ditemukan dugaan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD yang dilaksanakan baik pada tingkat Desa/kelurahan, Kecamatan, maupun tingkat Kabupaten. Hal ini terlihat pada daftar hadir pelaksanaan musrenbang di tahun 2020, 2021 dan 2022 rata rata kehadiran masyarakat hanya sekitar 35% (Hasil olah data dari Berita Acara dan Daftar Hadir Pelaksanaan Musrenbang).

Meskipun musrenbang berfungsi sebagai wadah untuk menyatukan kebutuhan masyarakat dan rencana pemerintah, namun kehadiran masyarakat pada acara musrenbang masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Desa pada tahun 2022. Demikian juga pada Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman pelaksanaan musrenbang, masih berjalan belum sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Selain itu Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang banyak perwakilan masyarakat yang tidak hadir.

Hal tersebut terlihat dari pengamatan dan daftar hadir pada saat penulis menghadiri kegiatan musrenbang di Kecamatan Tikke Raya, Dikecamatan Pedongga dan Kecamatan Pasangkayu pada tahun 2022. Begitupun pada Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten Di Kabupaten Pasangkayu berdasarkan hasil observasi saat menghadiri acara musrenbang dan sesuai berita acara dan daftar hadir tahun 2022 terlihat partisipasi masyarakat masih minim.

Hal lain yang terjadi adalah mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah ke atas yang dilakukan mulai dari musrenbang desa hingga ke

tingkat kabupaten belum melibatkan masyarakat dalam menentukan kegiatan mana yang harus diprioritaskan. Selain itu, ada kecenderungan bahwa usulan yang disampaikan dalam musrenbang desa dan kecamatan adalah hasil rumusan para elit tertentu di desa, bukan semata-mata usulan masyarakat berdasarkan sejumlah pengamatan. Karena fenomena ini, pemerintah desa masih memiliki keutamaan dalam menentukan kegiatan mana yang harus diprioritaskan untuk musrenbang berikutnya. Berdasarkan temuan wawancara dengan salah satu peserta Musrenbang di Kecamatan Pasangkayu tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta tidak mengetahui dan tidak memahami proses Musrenbang. Masalah lainnya adalah masyarakat sebagai peserta Musrenbang kurang memahami tentang mekanisme dan alur penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Didasarkan atas fenomena dan masalah tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang masalah ini.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini didasarkan atas latar belakang masalah yakni :

1. Bagaimanakah implementasi tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah di Kabupaten Pasangkayu melalui perspektif perencanaan partisipatif?
2. Faktor apa saja yang menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah di Kabupaten Pasangkayu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Mengetahui , menganalisa dan mendeskripsikan implementasi tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah di Kabupaten Pasangkayu melalui perspektif perencanaan partisipatif.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penentu tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah di Kabupaten Pasangkayu .

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk :

1. Memberikan informasi dan masukan kepada Pemerintah Daerah khususnya instansi terkait di kabupaten Pasangkayu dalam merumuskan kebijakan dan upaya penguatan implementasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD .
2. Menambah sumbangan perkembangan ilmu pengetahuan terkait implementasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian sejenis .

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan fokus untuk mengetahui implementasi tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah melalui perspektif perencanaan partisipatif dan mengidentifikasi faktor faktor penentu tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah .

Penelitian dilakukan di Kabupaten Pasangkayu dengan menggunakan data data dokumen perencanaan dalam Periode tiga tahun terakhir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Pengertian Pembangunan

Menurut Katz dalam Tjokrowinoto (1995), pembangunan adalah peralihan dari satu kondisi nasional yang dianggap unggul dan berharga ke kondisi nasional yang lain. Selain itu, pembangunan adalah proses multifaset yang melibatkan perubahan signifikan dalam struktur masyarakat, sistem sosial ekonomi, sikap, dan institusi nasional, serta percepatan pertumbuhan ekonomi, penghapusan kemiskinan absolut dan ketimpangan pengangguran (Todaro, 1977). Pengertian ini mengisyaratkan bahwa pembangunan mengacu pada suatu proses yang menghasilkan perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat .

Para ahli menawarkan berbagai definisi pembangunan, namun secara umum disepakati bahwa pembangunan adalah tindakan melakukan perubahan. Menurut Siagian (1994), "suatu upaya atau rangkaian upaya pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa (Nation building)", pembangunan dapat berupa didefinisikan sebagai "upaya atau rangkaian upaya pertumbuhan dan perubahan". Sementara itu, Ginanjar Kartasasmita 9) memberikan penjelasan yang lebih lugas tentang pembangunan yaitu: prosedur perbaikan melalui upaya-upaya terencana."

Para ahli dari berbagai bidang terlibat dalam upaya memahami makna pembangunan dan strategi yang paling efektif. Akibatnya, konsep pembangunan dapat diinterpretasikan dalam berbagai cara. Namun, pembangunan juga harus dipahami sebagai suatu proses dengan berbagai dimensi yang mencakup pergeseran orientasi serta struktur organisasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

2.1.2 Pengertian Perencanaan

Secara umum, kata "rencana" mengacu pada desain atau kerangka sesuatu yang perlu dilakukan. Waterson menyatakan (dalam buku Diana Conyers tahun 1994) Pada hakekatnya, perencanaan adalah suatu usaha yang secara sadar diorganisir dan berkelanjutan untuk memilih pilihan yang terbaik dari berbagai pilihan untuk mencapai tujuan tertentu. J Nehru, sebaliknya (dalam Diana Conyers '1994) menyatakan bahwa perencanaan adalah jenis pelatihan kecerdasan yang mengajarkan orang bagaimana memproses fakta dan situasi sebagaimana adanya dan menghasilkan solusi untuk masalah. Kunarjo memberikan definisi yang berbeda (2002:14), yang menyatakan bahwa perencanaan pada umumnya adalah proses penyiapan seperangkat keputusan masa depan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu .

Sedangkan menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1998:12), perencanaan adalah cara untuk membuat tujuan yang sebaik-baiknya (output maksimum) dengan sumber daya yang ada menjadi lebih efektif dan efisien. Ia juga mengatakan bahwa perencanaan adalah memikirkan bagaimana, kapan, dan siapa yang akan melakukan apa untuk mencapai atau mencapai tujuan. Dalam buku tahun 1993 yang ditulis oleh Malayu S.P. hasibuan, para ahli manajemen memberikan definisi yang berbeda, antara lain: Menurut George R. Terry, perencanaan adalah upaya memilih dan menghubungkan fakta, serta membuat dan menggunakan asumsi tentang masa depan, dengan cara menggambarkan dan merumuskan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Definisi tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan beberapa aspek penting dalam perencanaan antara lain tujuan "apa yang harus dicapai", kegiatan "langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan" dan waktu "kapan kegiatan harus dilaksanakan". Dapat disimpulkan sejumlah definisi perencanaan yang berbeda untuk menggambarkan bahwa perencanaan adalah langkah pertama dalam mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan pengambilan keputusan atau pilihan tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya yang sudah tersedia untuk mencapai tujuan tertentu di masa depan .

2.1.3 Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Perencanaan berfungsi sebagai alat untuk membuat pilihan, membuat rencana untuk masa depan, dan mengalokasikan sumber daya dan alat untuk mencapai tujuan. Jika dikaitkan dengan pembangunan, maka hasilnya diharapkan dapat menyelesaikan segala permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta efisien dan efektif. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perencanaan mutlak diperlukan agar pembangunan yang dilakukan lebih terarah, efektif, dan efisien. Pembangunan, di sisi lain, adalah proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui tindakan yang direncanakan .

Menurut Diana Conyers (1994: 5) “Karena setiap jenis perencanaan harus memiliki konsekuensi atau aspek sosial, maka perencanaan sosial harus berfungsi sebagai pedoman untuk seluruh proses perencanaan. Pemerintah atau lembaga lain biasanya menggunakan perencanaan semacam ini ketika mencoba menangani masalah terkait perubahan sosial dan ekonomi. Perencanaan pembangunan adalah nama dari perencanaan ini”. Selain itu, Bratakusumah dan Riyadi (2004:6) menegaskan bahwa “perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan. Perencanaan pembangunan merupakan landasan untuk mewujudkan kegiatan pembangunan sebagai langkah awal. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan perlu disusun dalam rencana strategis dalam arti tidak bersifat mengatur, penting, mendesak, dan mampu menyentuh kehidupan masyarakat luas. Selain itu juga harus mampu mengantisipasi tuntutan perubahan baik internal maupun eksternal. dan disusun menggunakan data aktual dari lapangan”.Keduanya menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu konsep perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik bagi pembangunan masyarakat, pemerintah, dan lingkungan di suatu wilayah tertentu dengan menggunakan atau memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada. Harus memiliki orientasi yang menyeluruh, utuh namun tetap berpegang pada prinsip prioritas dalam kaitannya dengan suatu daerah sebagai kawasan pembangunan sehingga terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah .

Tanpa mempertimbangkan situasi aktual di lapangan, perencanaan pembangunan tidak dapat dilakukan hanya di atas kertas. Data lapangan yang valid, disebut juga data primer, merupakan ornamen krusial yang harus ada dan dimanfaatkan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan dapat dipahami sebagai proses perumusan alternatif atau keputusan berdasarkan data dan fakta yang akan menjadi landasan bagi rangkaian kegiatan masyarakat, baik jasmani (mental) maupun rohani, dengan tujuan pencapaian tujuan yang lebih baik .

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan menghadapi kesulitan dan akibat yang cukup berat sebagai akibat dari perluasan otonomi daerah yang semakin menitikberatkan pada kabupaten dan kota, baik pada tahap perumusan kebijakan maupun pelaksanaan program. Oleh karena itu, pertumbuhan masyarakat lokal harus menjadi fokus utama model pembangunan daerah saat ini dan masa depan. Pergeseran paradigma dari pembangunan top-down ke pembangunan partisipatif digunakan untuk mengimplementasikan model pembangunan .

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan diperlukan untuk mencapai hasil yang baik, tepat waktu, tepat sasaran, efisien dan efektif. Hal ini disebabkan masyarakat sebagai salah satu komponen pembangunan secara alami memiliki kemampuan untuk mengetahui dan memahami apa yang ada di tempatnya. Selain itu, dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada masyarakat sehingga mereka memiliki kepedulian terhadap program-program pembangunan yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi pelaksanaannya .

Perencanaan yang bertujuan untuk mengikutsertakan kepentingan masyarakat baik langsung atau tidak langsung dikenal dengan perencanaan pembangunan partisipatif. Akan ada tiga dampak yang signifikan dari pelibatan masyarakat secara langsung, yaitu terhidar dari peluang terjadinya manipulasi, memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki masyarakat dan memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan .

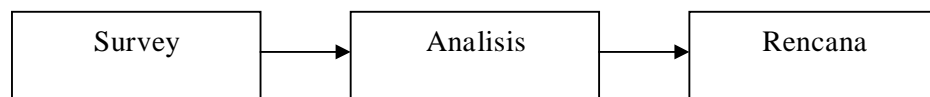
2.1.4 Partisipasi masyarakat

Partisipasi bukan hanya jadi kunci dalam “pembangunan” tetapi juga kualitas tata pemerintahan yang baik. Partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “participation” yang berarti ikut serta. Arti “partisipasi” dijelaskan secara rinci dalam Kamus Bahasa Indonesia mengambil bagian dalam sesuatu.”Partisipasi masyarakat dalam pembangunan” secara umum adalah keikutsertaan seluruh anggota atau wakil masyarakat dalam proses pengambilan keputusan perencanaan dan pengelolaan pembangunan. Ini termasuk memutuskan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, dan bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi rencana tersebut .

Geddesian (Sommermo, 2005: 26) berpendapat bahwa sejak awal masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses perencanaan. Peran serta masyarakat dapat berupa: 1) pendidikan melalui pelatihan; 2) partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi; dan 3) partisipasi dalam memberikan rencana dan gagasan alternatif kepada pemerintah”. Secara skematis struktur partisipasi dalam perencanaan seperti berikut :

Gambar 2.1

Struktur Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan

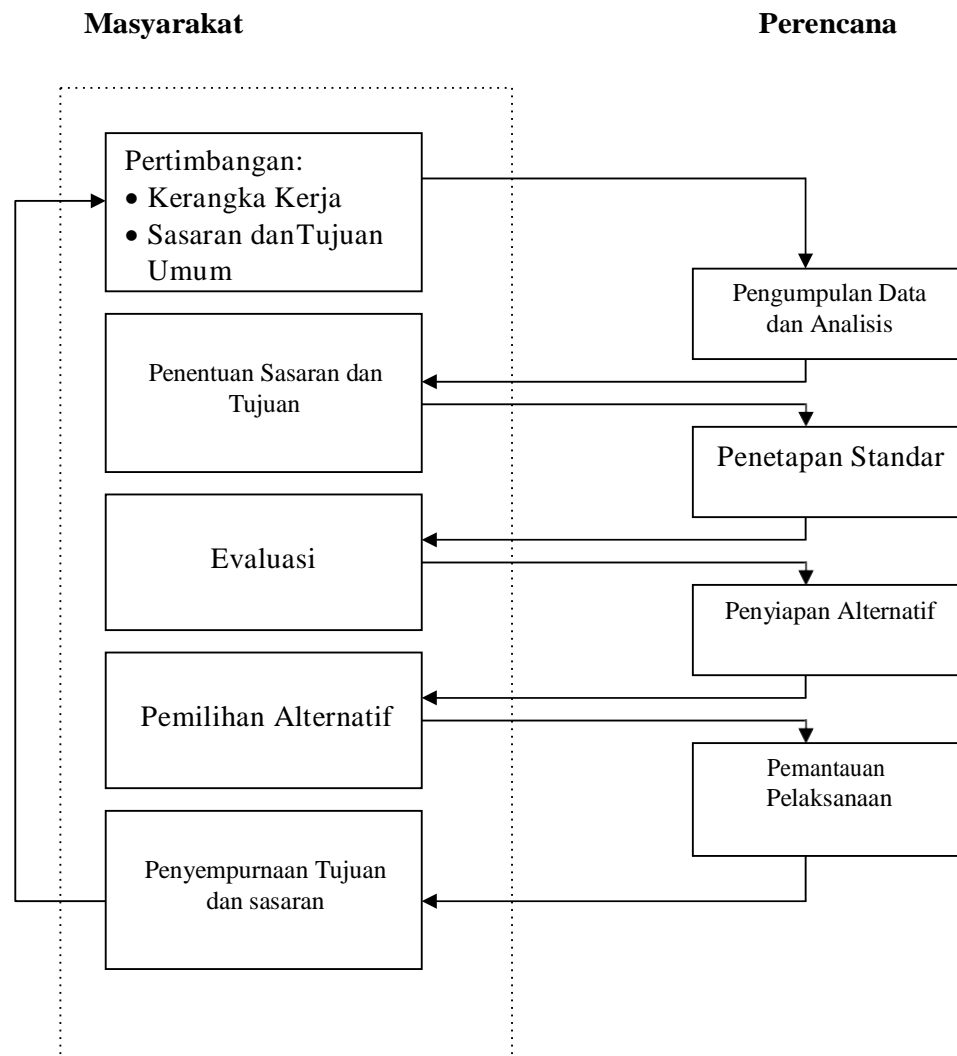


Sumber: Geddesian dalam Soemarmo

Kata “Robert (dalam Soemarmo, 2005) mengemukakan cara yang berbeda dalam berpartisipasi dalam masyarakat. Secara umum, Robert setuju dengan geddesian. Dia berpendapat bahwa perencanaan pembangunan pada dasarnya memerlukan partisipasi masyarakat sejak awal. Robert mendefinisikan perencanaan partisipatif sebagai kegiatan perencanaan dan kegiatan masyarakat” yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.2

Peluang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Alternatif Kebijakan dan Program



Sumber: Robert (dalam Soemarmo, 2005)

Menurut gambar di atas, “partisipasi masyarakat berada pada tahap pemilihan alternatif kebijakan dan program, sementara perencana menetapkan tujuan, sasaran, dan kebijakan”. Menurut McConnel (dalam Soemarmo, 2005), partisipasi masyarakat dalam penetapan tujuan, sasaran, dan kebijakan bersama antara perencana dan masyarakat merupakan masukan sekaligus ungkapan aspirasi masyarakat”.

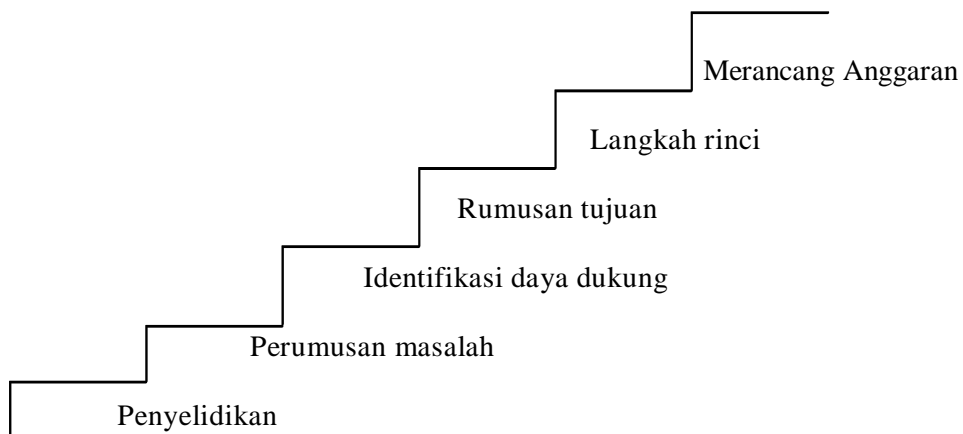
Alexander Abe (2002:81) mengemukakan “pengertian perencanaan partisipatif sebagai berikut: “perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak

langsung) tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sangat sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat.”

Lebih lanjut Abe mengemukakan “langkah-langkah dalam perencanaan partisipatif yang disusun dari bawah yang dapat digambarkan sebagai tangga perencanaan” sebagai berikut :

Gambar 2.3

Langkah-langkah perencanaan partisipatif yang disusun dari bawah



Sumber: Alexander Abe (2001:100)

Langkah-langkah di atas, dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut :

1. Penyelidikan, adalah sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan persoalan-persoalan bersifat local yang berkembang di masyarakat .
2. Perumusan masalah, merupakan tahap lanjut dari proses penyelidikan . Data atau informasi yang telah dikumpulkan diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap, utuh dan mendalam .
3. Identifikasi daya dukung, dalam hal ini daya dukung diartikan sebagai dana konkrit (uang) melainkan keseluruhan aspek yang bisa memungkinkan target yang telah ditetapkan .
4. Rumusan Tujuan
Tujuan adalah kondisi yang hendak dicapai, sesuatu keadaan yang

diinginkan (diharapkan), dan karena itu dilakukan sejumlah upaya untuk mencapainya .

5. Langkah rinci

Penetapan langkah-langkah adalah proses penyusunan apa saja yang akan dilakukan. Proses ini merupakan proses membuat rumusan yang lebih utuh, perencanaan dalam sebuah rencana tindak .

6. Merancang anggaran, disini bukan berarti menghitung uang, melainkan suatu usaha untuk menyusun alokasi anggaran atau sumber daya yang tersedia .

Menurut Mikkelsen (2001:64) mendefinisikan “partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri dalam konteks pengembangan diri, kehidupan, dan lingkungannya dengan memperkuat dialog antara masyarakat lokal dan staf yang mempersiapkan, melaksanakan, dan memantau proyek sehingga mereka memperoleh informasi tentang konteks lokal dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh proyek tersebut”.

Mikkelsen,(2001: 65), menyatakan bahwa secara umum ada dua pendekatan partisipasi: (1) Tujuan dari proses demokrasi adalah partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Namun, sangat sedikit orang yang mau berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan sendiri; 2) partisipasi koersif dengan motivasi positif. Masyarakat terdorong untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan metode ini, dimotivasi oleh keinginan untuk melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan dengan lebih baik. Selain itu disebutkan bahwa partisipasi dapat bersifat sukarela pada tingkat yang berbeda, maupun pada tingkat kegiatan masyarakat yang berbeda. Namun, partisipasi sukarela dan aktif merupakan cita-cita yang harus diupayakan untuk mencapai keberhasilan pembangunan.

Club Du Sahel (dalam Mikkelsen 2001:69-70) mendeskripsikan pendekatan- pendekatan dalam pelaksanaan partisipasi sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Pendekatan-pendekatan Partisipasi
Club Du Sahel, 1988

No.	Jenis Partisipasi	Pendekatan	Keterangan
1.	Partisipasi pasif, pelatihan dan informasi.	Pendekatan “kami lebih tahu apa yang baik bagimu”.	Komunikasi satu arah seperti antara guru dan murid yang diterapkan antara staf proyek dan masyarakat
2.	Partisipasi Aktif	Pendekatan “pelatihan dan Kunjungan”.	Dialog dan komunikasi 2 arah memberikan kepada masyarakat kesempatan untuk berinteraksi dengan petugas penyuluh dan pelatih dari Luar .
3.	Partisipasi dengan keterikatan.	Pendekatan “kontrak, tugas yang dibayar”. Bila anda melakukan ini, maka proyek akan melakukan itu.	Masyarakat setempat, baik sebagai pribadi ataupun kelompok kecil, diberikan pilihan untuk terikat pada sesuatu dengan tanggung jawab atas setiap kegiatan pada masyarakat atau proyek. Model ini memungkinkan untuk beralih dari model klasik kepada model yang diberi subsidi, dimana panitia setempat bertanggung jawab atas pengorganisasian dan pelaksanaan tugas. Manfaatnya: dapat dibuat modifikasi seiring tujuan yang diinginkan
4.	Partisipasi atas permintaan setempat.	Kegiatan yang didorong oleh permintaan.	Kegiatan yang brefokus untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat, bukan kebutuhan yang dirancang dan disuarakan pihak luar. Kegiatan bukanlah proyek yang tipikal: tidak ada sasaran untuk suatu periode tertentu, tidak ada rencana dan struktur proyek dan tidak ada komando satu arah dari proyek

			<p>kepada kelompok sasaran.</p> <p>Masalahnya: bagaimana masyarakat setempat dapat memberi perhatian terhadap sesuatu yang baru dan berbeda, apabila sebelumnya mereka tidak mengetahui apapun mengenai apa yang akan terjadi</p>
--	--	--	---

Sumber: Club Du sahel (dalam Mikkelsen, 2001:69-70)

Menurut Wijaya (2001), Wicaksono dan Sigiarto, "Perencanaan partisipatif adalah upaya masyarakat untuk secara mandiri mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan". Berikut ciri-ciri perencanaan partisipatif yang digariskan oleh keduanya :

1. Terfokus pada kepentingan masyarakat .
 - a. Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat .
 - b. Perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka .
2. Partisipatoris (keterlibatan)"Setiap masyarakat melalui forum pertemuan, memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat".
3. Dinamis
 - a. Perencanaan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak.
 - b. Proses perencanaan berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif.
4. Sinergitas
 - a. Harus menjamin keterlibatan semua pihak.
 - b. Selalu menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi.
 - c. Setiap rencana yang akan dibangun sedapat mungkin menjadi kelengkapan yang sudah ada, sedang atau akan dibangun.
 - d. Memperhatikan interaksi diantara *stakeholders*.

5. Legalitas

- a. Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku.
- b. Menjunjung etika dan tata nilai masyarakat.
- c. Tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

6. Fisibilitas

Perencanaan harus bersifat spesifik, terukur, dan dijalankan dan mempertimbangkan waktu.

Berikut kriteria perencanaan partisipatif yang dikemukakan oleh Samsura (dalam Fitriasturi, 2005:40) sesuai dengan ciri-ciri tersebut di atas:

1. Semua pihak terlibat.
2. Institusi masyarakat yang sah dan kuat sedang dibangun.
3. Melalui negosiasi terjadi proses politik yang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama.
4. Sebagai bagian dari proses demokratisasi, dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan belajar bersama.

2.1.5 Faktor Penentu Tingkat Partisipasi Masyarakat

Menurut Slamet (1994:97), “faktor sosiologis seperti usia, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan, dan pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku individu”. Karakteristik individu, seperti “umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lama menjadi anggota masyarakat, jumlah pendapatan, dan partisipasi dalam kegiatan pembangunan”, secara teoritis berdampak pada partisipasi (Slamet, 1994:137-143).

Sementara itu, Plumer (2004:27) mengatakan bahwa kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1. Pengetahuan dan keahlian.

Lingkungan masyarakat secara keseluruhan akan dipengaruhi oleh pengetahuan dasar yang dimiliki. Hal ini agar masyarakat mengetahui tahapan dan bentuk partisipasi yang ada saat ini

2. Pekerjaan masyarakat

Sebagian besar waktu, orang yang memiliki jumlah pekerjaan tertentu akan dapat lebih banyak berpartisipasi dalam suatu proyek atau tidak sama sekali. Konflik antara keinginan untuk berpartisipasi dan komitmen untuk bekerja seringkali menjadi penyebab utama masyarakat .

2. Tingkat pendidikan dan buta huruf

Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada .

3. Jenis kelamin

Keinginan dan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi, serta pemahaman mereka dan penerapan tingkat dan bentuk partisipasi yang ada, sangat dipengaruhi oleh faktor ini .

4. Kepercayaan terhadap budaya tertentu

Strategi dan metode partisipasi yang digunakan akan ditentukan oleh masyarakat yang memiliki tingkat keragaman yang tinggi, khususnya dalam hal agama dan budaya. Keyakinan yang sering dianut mungkin bertentangan dengan gagasan yang diketahui .

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam suatu perencanaan pembangunan daerah yang di ambil dari kesimpulan beberapa pandangan ahli yakni :

1. Pendidikan

Menurut Plumer (dalam Suryawan, 2004:27), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah pengetahuan dan keahlian, pekerjaan masyarakat, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan kepercayaan terhadap budaya tertentu .

2. Pekerjaan

Salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi adalah pekerjaan dan penghasilan yang dimiliki dan dianggap sudah dapat mencukupi kebutuhan hidupnya .

3. Jenis Kelamin

Partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi salah satunya adalah jenis kelamin.

4. Latar Belakang Sosial Budaya

Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada .

2.2 Penelitian Terdahulu

Tujuan penelitian terdahulu adalah agar mendapat acuan dan bahan perbandingan terhadap suatu penelitian yang sedang dikerjakan. Selain itu, agar menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka dalam kajian Pustaka, peneliti menampilkan hasil-hasil Penelitian terdahulu. Akan tetapi terdapat persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dan penelitian ini. Beberapa penelitian mengenai partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan pernah dilakukan oleh :

1. Yudi Ariantara (2016) dengan judul Tesis Study partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan di kecamatan pondok kelapa kabupaten bengkulu Tengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan untuk menganalisa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, apabila dilihat dari nilai rata-rata keseluruhan dimensi yang ada tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah adalah rendah .
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis pembobotan yang dinilai dalam skala likert yang terdiri dari 5 jenjang mulai yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi .
2. Robinson (2011) dengan judul tesis Efektifitas Program Perencanaan Partisipatif Pembangunan Pedesaan (Study Evaluasi Program Pengembangan Fisik di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, analisis kuantitatif Dilakukan untuk menilai kinerja Pembangunan jalan kampung dan menilai Pemberdayaan masyarakat yang Ada di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, Hasil dari Penelitian yang dilakukan, pelaksanaan Perencanaan partisipatif di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma berjalan cukup efektif .
3. Purnamasari (2008) dengan judul tesis Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dimana dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa proses pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi belum dilaksanakan secara optimal dan partisipasi masyarakat dalam

perencanaan pembangunan tersebut masih rendah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, metode ini berusaha mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci atau mendalam partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi .

Dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yakni variabel penelitian dan alat analisis .

2.3 Kerangka Pikir Analisis

Berikut adalah kerangka pikir “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Pasangkayu melalui perspektir perencanaan partisipatif yang merupakan kerangka teoritik dalam penelitian ini .

Gambar 2.4

Kerangka Pikir Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Di Kabupaten Pasangkayu

